

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan dalam negeri melalui sektor pajak merupakan penerimaan paling populer bagi negara. Hal ini terjadi akibat pengaruh pergeseran penerimaan dari sektor nonpajak ke sektor penerimaan pajak. Artinya pajak menempati posisi teratas sebagai sumber penerimaan yang pertama dan utama dalam meningkatkan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha dengan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Pemerintah sudah menerapkan berbagai kebijakan demi memaksimalkan penerimaan pajak. Akan tetapi pemerintah tidak bisa berjalan sendiri untuk mewujudkan penerimaan pajak maksimal, diperlukan peran serta masyarakat, yang dalam hal ini berperan sebagai subjek pajak. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya menjadi kendala utama bagi pemerintah. Banyak masyarakat yang sudah memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak tetapi tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, hal ini akan membuat penerimaan pajak berkurang. Semakin besar kesadaran subjek pajak untuk mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, akan semakin baik. Untuk menjadi Wajib Pajak, harus memenuhi syarat subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan sistem *self assessment*.

Dalam hal memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Wajib Pajak bisa mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Wajib Pajak atau orang yang diberi kuasa khusus yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau pengusaha yang melaporkan kegiatan usaha untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir pendaftaran ke KPP.

Berdasarkan formulir pendaftaran tersebut, KPP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan atau Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Kartu NPWP dan SKT Paling lama pada hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 3 hari kerja berikutnya setelah pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap. Dalam hal Wajib Pajak melakukan pendaftaran sekaligus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka Kartu NPWP, SKT, dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak diterbitkan secara bersamaan paling lambat 3 hari kerja berikutnya setelah permohonan pendaftaran dan pelaporan beserta persyaratannya diterima secara lengkap, ini merupakan proses mendapatkan NPWP secara manual.

Namun, seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputersasi dan internet, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadopsi sebuah sistem baru yang akan memudahkan subjek pajak mendapat NPWP, sistem tersebut adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak secara online atau *e-Registration*. *e-Registration*, adalah sistem pendaftaran, perubahan data Wajib Pajak dan atau

pengukuhan dan pencabutan pengukuhan PKP melalui sistem yang terhubung langsung secara online dengan DJP. *e-Registration* mulai efektif digunakan sejak tahun 2005, yaitu sejak diterbitkan keputusan Dirjen No: KEP-173/PJ/2004 tanggal 7 Desember 2004 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP. Namun terjadi perubahan peraturan dari KEP-173/PJ/2004 menjadi PER-24/PJ/2009 yang membawa perubahan cukup signifikan mengenai Tata Cara Pendaftaran dengan sistem *e-Registration*, salah satunya yang paling mendasar adalah petugas pajak di KPP tidak perlu lagi menunggu berkas pendaftaran dari Wajib Pajak untuk melakukan proses validasi NPWP.

Dengan adanya *e-Registration*, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk mendaftar, update, hapus dan informasi apapun, kapanpun serta di mana saja. Namun pada kenyataannya sistem *e-Registration* sering mengalami *error* atau tidak bisa diakses, sehingga berdampak pada kualitas pelayanan dalam pembuatan NPWP. Sehingga penulis tertarik untuk membuat Laporan Akhir yang berjudul “**EVALUASI ATAS PENERAPAN APLIKASI *e-REGISTRATION* DALAM PEMBUATAN NPWP DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA TANJUNG KARANG TAHUN 2012-2013**”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Rumusan Masalah

Apakah pelaksanaan program *e-registration* di KPP Pratama Tanjung Karang telah berjalan dengan baik dan mampu mempermudah proses pendaftaran Wajib Pajak baru.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penulisan laporan akhir ini yang menjadi batasan masalah adalah penerpan aplikasi *e-Resistrasion* secara kolektif di KPP Pratama Tanjung Karang tahun 2012-2013.

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tugas akhir ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tata cara dan prosedur pelaksanaan pembuatan NPWP dengan menggunakan Aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Tanjung Karang.
- 2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi petugas dalam pembuatan NPWP dengan menggunakan Aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Tanjung Karang.
- 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pembuatan NPWP dengan menggunakan Aplikasi *e-Registration* di KPP Pratama Tanjung Karang.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini tentunya sangat bermanfaat bagi semua pihak, manfaat yang dapat kita ambil dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

- 1) Bagi Mahasiswa
 - a. Menambah pengetahuan dan pengalaman belajar di bidang perpajakan khususnya bidang Ekstensifikasi pajak.

- b. Mengaplikasikan disiplin ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan yang timbul selama melaksanakan PKL.
 - c. Meningkatkan profesionalisme, memperluas wawasan dan memantapkan pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa dalam menerapkan ilmu khususnya di bidang perpajakan.
 - d. Menciptakan dan mengembangkan rasa tanggung jawab serta kedisiplinan.
 - e. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan mendapatkan pengalaman kerja.
 - f. Memperbanyak jaringan atau komunikasi sehingga membantu memudahkan beradaptasi.
- 2) Bagi Universitas Lampung
- a. Mempererat hubungan Universitas Lampung dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.
 - b. Memberikan gambaran secara nyata mengenai pembuatan NPWP.
 - c. Mengimplemetasikan aplikasi yang nyata pada kurikulum pendidikan.
 - d. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Lampung.
 - e. Sebagai tawaran umpan balik untuk evaluasi dan penyempurnaan kurikulum.
 - f. Membantu pihak terkait dalam melaksanakan pekerjaan.
- 3) Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang
- a. Peningkatan kerjasama yang lebih baik dengan Universitas Lampung.

- b. Mendapatkan gagasan dan ide-ide yang baru khususnya dari Universitas Lampung.
- c. Mempromosikan *image* Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tanjung Karang.
- d. Membantu pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat wajib pajak melalui mahasiswa PKL.
- e. Membantu dan mempermudah pihak Kantor Pelayanan Pajak dalam melakukan tugas-tugas perpajakan terkait.

1.6 Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori atau konsep yang digunakan untuk pembahasan serta deskripsi mengenai data dan fakta yang dijumpai selama praktek kerja lapangan yang berhubungan erat dengan judul dan pokok bahasan laporan serta hal yang terkait dalam penulisan laporan.

BAB III: METODE PENULISAN

Dalam Bab ini Penulis menjelaskan tentang gambaran umum tempat dilaksanakannya praktek kerja lapangan yaitu KPP Pratama Tanjung Karang, Sejarah berdirinya KPP Pratama Tanjung Karang, asas dan Tujuan, Struktur organisasi KPP Pratama Tanjung Karang, serta mekanisme dan pokok bahasan Laporan Tugas Akhir.

BAB IV:PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan mengenai proses pembuatan NPWP dengan menggunakan aplikasi *e-Registrasion*.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan inti sari yang mencakup seluruh objek pembahasan yang dibahas dalam PKL. Sedangkan Saran merupakan hal-hal, ide-ide, atau gagasan yang harus dilakukan dalam mengatasi masalah yang dibahas dari objek pembahasan yang terdapat dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.